

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.970>

Vol. 7 No. 2 (2024)
pp. 543-555

Research Article

Analisis Komparatif Kebijakan Moneter Negara Islam Iran Dan Pakistan

Asep Dadang Hidayat¹, Yadi Janwari², Sofyan Al-Hakim³

1. STAI Daarut Tauhiid; adhidayat.staidt@gmail.com 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sofyanalhakim@uinsgd.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 04, 2023
Accepted : March 15, 2024

Revised : February 14, 2024
Available online : April 26, 2024

How to Cite: Asep Dadang Hidayat, Yadi Janwari and Sofyan Al-Hakim (2024) "Comparative Analysis of the Monetary Policies of the Islamic State of Iran and Pakistan", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 543-555. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.970.

Comparative Analysis of the Monetary Policies of the Islamic State of Iran and Pakistan

Abstract. This research intends to analyse comparatively the monetary policy in Iran and Pakistan. The object of this research is the Islamic countries of Iran and Pakistan. This research is a descriptive-analytical research with qualitative research, which is a research procedure that produces descriptive data in the form of written words from people and observed behaviour, supported by literature studies. The results of this study indicate that monetary policy in Iran and Pakistan as Islamic countries, both apply Sharia-based monetary, but also opened monetary services to accommodate a number of general, commercial and or conventional economic transactions. This shows that both Iran and Pakistan apply monetary governance that is committed to Islamic law, but is inclusive of conventional ones even though it cannot dominate them. Monetary governance in both countries plays a more direct role in economic growth, not as an effective moderator of government economic policy.

Keywords: Comparison, Monetary Policy, Iran, Pakistan

Abstrak. Penelitian ini bermaksud menganalisis secara komparatif tentang kebijakan moneter di Iran dan Pakistan. Obyek penelitian ini adalah negara Islam Iran dan Pakistan. Penelitian ini karya tulis deskriptif-analitis (*descriptive-analistic research*) dengan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter di Iran dan Pakistan sebagai negara Islam, keduanya menerapkan moneter berbasis Syariah, tetapi dibuka juga layanan moneter untuk mengakomodir sejumlah transaksi ekonomi yang bersifat umum, komersil dan atau konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara Iran dan Pakistan menerapkan tata kelola moneter yang komitmen dengan syariat Islam, tetapi bersifat inclusive bagi yang konvensional meskipun tidak dapat mendominasinya. Tata kelola pemerintahan (*governance*) bidang moneter di kedua negara tersebut lebih berperan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai moderator yang efektif bagi kebijakan ekonomi pemerintah.

Kata Kunci: Komparasi, Kebijakan Moneter, Iran, Pakistan

PENDAHULUAN

Tingkat harga merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam sistem perekonomian modern, karena bisa menjaga keseimbangan alokasi sumber daya ekonomi dalam suatu negara. Dengan adanya tingkat inflasi yang tinggi dapat mengaburkan bahkan menghilangkan indikator tersebut dan mendistorsi harga-harga yang terjadi. Hal ini akan menyulitkan suatu perencanaan dan tidak memotivasi masyarakat dan juga dunia usaha untuk melakukan tabungan dan investasi (Wulan Asturi, 2013: 98).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata pada hakikatnya merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat, karena mampu menggambarkan secara riil terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat. Parameter untuk mengukur tingkat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga bisa dilihat dari adanya sumber daya manusia yang berkualitas (Sadono Sukirno, 2015: 44).

Dalam suatu sistem perekonomian modern target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Pemerintah. Penetapan sasaran inflasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dilakukan oleh pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi 2019-2021 yang ditetapkan masing-masing sebesar 3,5%, 3,0% dan 3,0%, dengan deviasi masing-masing $\pm 1\%$ (BI, 2019).

Sementara inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan (*shocks*) seperti halnya kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Dilihat dari segi bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor kejutan diwakili oleh kelompok *volatile food* dan *administered prices* yang mencakup kurang lebih 40% dari

bobot IHK. Pengendalian inflasi sangat penting menjadi salah satu perhatian pemerintah karena beberapa alasan. Inflasi bisa memperburuk distribusi pendapatan yaitu menjadi tidak seimbang, menyebabkan berkurangnya tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi bagi negara-negara berkembang. Dengan terjadinya inflasi juga bisa mengakibatkan defisitnya neraca perdagangan serta meningkatnya utang luar negeri.

Salah satu kebijakan yang efektif untuk mengatasi kondisi ekonomi yang tidak stabil pada suatu negara adalah melalui kebijakan moneter. Stabilitas ekonomi suatu negara diantaranya tercermin dari stabilitas harga, dalam arti tidak terdapatnya gejolak harga yang besar yang dapat merugikan masyarakat, baik konsumen maupun produsen yang akan merusak sendi-sendi perekonomian.

Kenaikan harga-harga yang menjadi penyebab terjadinya inflasi dapat diklasifikasikan dan jika harga-harga naik secara perlahan-lahan, maka inflasi yang terjadi disebut sebagai "*Creeping Inflation*". Jika harga-harga meningkatnya secara cepat maka kondisi tersebut disebut sebagai "*Hyperinflation*" atau inflasi yang melebihi 50 persen per bulan atau lebih dari 1 persen per hari (Mankiw, 2003).

Salah satu kebijakan yang efektif untuk mengatasi kondisi ekonomi yang tidak stabil pada suatu negara adalah melalui kebijakan moneter. Stabilitas ekonomi suatu negara diantaranya tercermin dari stabilitas harga, dalam arti tidak terdapatnya gejolak harga yang besar yang dapat merugikan masyarakat, baik konsumen maupun produsen yang akan merusak sendi-sendi perekonomian negeri-negara di dunia.

Iran adalah negara Islam dengan sumber utama pendapatan di sektor minyak dan gas. Sebagian besar pendapatan ekspor berasal dari penjualan minyak. Iran telah lama menghadapi sanksi internasional, terutama terkait dengan program nuklirnya. Sanksi ini telah berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan akses ke pasar global. Inflasi dan Nilai Tukar. Inflasi dan fluktuasi nilai tukar mata uang rial Iran telah menjadi masalah, yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Pemerintah Iran telah berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dengan berinvestasi dalam sektor-sektor non-minyak seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata.

Sementara itu negara Pakistan memiliki agriculture and Services di bidang pertanian, dan tetap menjadi bagian penting dari ekonomi Pakistan, dengan sektor jasa yang semakin berkembang. Jasa keuangan, telekomunikasi, dan sektor perdagangan juga berkontribusi secara signifikan. Pakistan menerima jumlah remitansi yang signifikan dari warganya yang bekerja di luar negeri. Remitansi ini berperan penting dalam menyokong perekonomian domestik. Pakistan telah berusaha untuk meningkatkan infrastrukturnya dan membuka pintu bagi investasi asing. Proyek-proyek seperti China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) memiliki dampak signifikan. Pakistan juga menghadapi tantangan keuangan, termasuk defisit anggaran, utang yang meningkat, dan masalah struktural dalam administrasi pajak.

Dalam artikel ini penulis akan menganalisis secara komparatif mengenai bagaimana kebijakan moneter negara Islam Iran dan Pakistan. Bagaimana analisis perbandingan kebijakan suku bunga, kebijakan mata uang, dan langkah-langkah kebijakan lainnya. Kebijakan moneter di Iran dan Pakistan bisa menjadi subjek penelitian yang menarik karena masing-masing negara memiliki karakteristik

ekonomi dan tantangan yang unik. Beberapa topik menarik yang bisa diteliti terkait kebijakan moneter di kedua negara tersebut melibatkan aspek-aspek berikut:

Pertama, Pengaruh Sanksi Internasional, bagaimana kebijakan moneter di Iran merespons dan beradaptasi dengan sanksi internasional yang berdampak pada sektor keuangan dan ekonomi negara. Kedua, Inflasi dan Nilai Tukar, analisis mengenai bagaimana kebijakan moneter di Iran berusaha mengatasi tantangan inflasi dan fluktuasi nilai tukar mata uang rial. Ketiga, diversifikasi Ekonomi, bagaimana kebijakan moneter mendukung upaya pemerintah untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor minyak.

Sedangkan di Pakistan berkenaan dengan peran *remittances*, bagaimana kebijakan moneter di Pakistan mempengaruhi dan merespons peran remitansi dalam perekonomian, serta upaya untuk mengoptimalkan manfaatnya. Berkenaan dengan infrastruktur dan Investasi Asing, bagaimana kebijakan moneter mendukung atau mempengaruhi proyek-proyek infrastruktur besar, terutama yang terkait dengan investasi asing seperti CPEC, dan dampaknya pada stabilitas ekonomi.

Perbandingan Kebijakan Moneter, menganalisis perbedaan dan kesamaan antara kebijakan moneter di Iran dan Pakistan, serta dampaknya pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Resilience terhadap Krisis Ekonomi Global, bagaimana kebijakan moneter di kedua negara bertindak dalam menghadapi krisis ekonomi global, terutama dalam konteks ketidakpastian ekonomi global. Meneliti bagaimana stabilitas politik di kedua negara mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dan kestabilan ekonomi.

Penelitian tentang kebijakan moneter di Iran dan Pakistan dinilai penting agar dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang ekonomi di kedua negara serta dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Agar tidak terlalu melebar dan bias, maka penulis fokuskan kajian ini pada perbandingan kebijakan moneter di kedua negara tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini secara keseluruhan merupakan jenis karya tulis deskriptif-analitis (*descriptive-analistic research*) dengan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data dan angka, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Sistem Moneter Iran

Iran memiliki sejarah sistem moneter yang panjang dan unik karena dipengaruhi oleh berbagai kekuatan asing. Setelah runtuhnya dinasti Qajar pada 1925, Iran mengalami modernisasi sistem moneter di bawah Reza Shah Pahlavi. Pada 1930-an, Bank Melli Iran didirikan sebagai bank sentral pertama Iran untuk mengelola mata uang Rial. Namun, pengaruh Inggris sangat kuat dalam menentukan kebijakan moneter dan nilai tukar Rial selama periode ini (M. A. Choudhary et al, 2015: 38).

Setelah nasionalisasi industri minyak pada 1951 di bawah Mossadegh, campur tangan asing dalam kebijakan moneter Iran berkurang. Tetapi karena kudeta AS-Inggris tahun 1953, Shah kembali berkuasa dan kebijakan moneter tetap dipengaruhi Barat. Revolusi Islam tahun 1979 di bawah Khomeini menegaskan kedaulatan ekonomi dan keuangan. Kebijakan moneter bergeser untuk melayani ekonomi Islam yang berbasis moral dan nilai-nilai keadilan sosial. (M. A. Choudhary et al, 2015: 67).

Sistem perbankan syariah diperkenalkan pada 1983. Bank Markazi direstrukturisasi menjadi bank sentral independen yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Sampai saat ini Iran terus berupaya menyempurnakan sistem moneter Islamnya. Sebelum Bank Melli Iran didirikan pada 1906, Iran tidak memiliki bank sentral atau sistem moneter yang terpadu. Mata uang asing seperti rubel Rusia dan pound Inggris beredar di pasar. Setelah Revolusi Islam tahun 1979, undang-undang perbankan baru diterapkan berdasarkan hukum Islam. Bank-bank non syariah tidak diizinkan memberikan pembiayaan untuk aktivitas yang dilarang seperti alkohol dan babi (S. H. Mirshojaeian & H. S. K. Obidollah, 2013: 65)

Pada 1983, Undang-Undang Perbankan Tanpa Bunga secara resmi mendirikan sistem perbankan syariah di Iran. Bunga bank dihapuskan dan diganti dengan skema bagi hasil Islami seperti Mudharabah dan Musharakah. Reformasi ekonomi pada 2000-an menekankan privatisasi perbankan dan diversifikasi instrumen keuangan. Obligasi dan surat berharga syariah mulai diterbitkan bagi investasi sektor publik dan privat.

Setelah sanksi ekonomi diberlakukan terhadap Iran, pemerintah gencar melakukan "ekonomi resistensi" dengan memperkuat sektor riil, mengawasi nilai tukar, dan mengandalkan sumber daya energi. Saat ini, bank sentral Iran tengah fokus mengembangkan sistem pembayaran digital, menjaga stabilitas harga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Itulah garis besar sejarah sistem moneter di Iran sebagai sebuah negara Islam yang kaya sejarah dengan berbagai pengaruh dinasti, kekuatan asing, hingga revolusi Islam yang membentuk wajah kebijakan moneternya saat ini.

Struktur sistem perbankan Iran

1. Bank Sentral Iran

- 1) Bank Markazi (Bank Sentral Republik Islam Iran). Bank Markazi merupakan bank sentral dan otoritas moneter tertinggi di Iran. Bank Markazi bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai Rial, mengatur perbankan dan lembaga keuangan, serta mengelola cadangan devisa negara.
- 2) Dewan Moneter dan Kredit. Dewan Moneter dan Kredit menyusun kebijakan moneter dan penetapan target-target operasional sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan dipimpin oleh Gubernur Bank Markazi dengan anggota menteri terkait dan kepala bank-bank umum.
- 3) Majelis Umum. Majelis Umum mengawasi implementasi kebijakan moneter, stabilitas harga, serta evaluasi kinerja Bank Markazi. Majelis bersidang minimal 2 kali setahun dan dipimpin oleh Presiden Iran.

- 4) Komite Stabilitas Keuangan. Komite ini mengevaluasi stabilitas sistem keuangan dan mengidentifikasi risiko yang mempengaruhi sektor riil perekonomian Iran serta merumuskan antisipasi penanganannya. Demikian struktur sistem perbankan sentral Iran yang mengedepankan prinsip syariah dalam setiap keputusan dan kebijakan moneter maupun makroprudensial (Bank Sentral Republik Islam Iran. Struktur Organisasi Bank Markazi).

2. Bank-bank komersial

- 1) Bank Umum. Merupakan bank komersial konvensional yang menjalankan sistem bunga. Contoh: Bank Melli, Bank Sepah, Bank Maskan, Bank Refah, dll.
- 2) Bank Perkreditan. Memberikan pembiayaan skala kecil dan menengah ke sektor pertanian, industri kecil, ekspor non-minyak. Contoh: Bank Keshavarzi, Bank Sanat va Ma'dan.
- 3) Bank Pembangunan. Membiayai proyek infrastruktur skala besar seperti bendungan, jalan tol, kilang minyak, dan pembangkit listrik. Contoh: Bank Saderat.
- 4) Bank Non-Bunga/Bank Syariah. Mengacu pada hukum Islam dalam aktivitas perbankan, seperti bagi hasil, jual beli, sewa. Contoh: Bank Maskan, Bank Pasargad, Bank Saman, Bank Karafarin, dll.
- 5) Institusi Keuangan Bukan Bank. Memberikan layanan keuangan non-perbankan seperti asuransi, lembaga pembiayaan, kredit konsumen, modal ventura, dll.

Perkembangan bank syariah terus meningkat dengan dukungan regulasi dan infrastruktur khusus dari Bank Markazi. Persaingan ketat antar bank baik syariah maupun konvensional mendorong inovasi produk, efisiensi biaya, hingga kualitas layanan.

3. Instrumen dan kebijakan moneter di Iran

Operasi pasar terbuka

- 1). Penjualan dan Pembelian Surat Berharga Syariah. Bank Markazi menjual atau membeli surat berharga syariah seperti Sukuk Ijarah dan Sukuk Mudharabah dari dan kepada bank-bank komersial. Hal ini dilakukan untuk mengatur likuiditas perbankan sekaligus mendorong pasar keuangan syariah.
- 2). Transaksi Bai Al-Inah. Dilakukan antara Bank Markazi dengan bank syariah. Bank Markazi menjual aset kepada bank syariah secara tidak tunai lalu membelinya kembali secara tunai dengan harga yang berbeda untuk memberikan likuiditas jangka pendek.
- 3). Qardhul Hasan. Merupakan pinjaman lunak tanpa bunga antara Bank Markazi dengan bank syariah untuk menjaga posisi likuiditas bank syariah agar sesuai dengan giro wajib minimum syariah.
- 4). Repo Syariah. Instrumen yang menggunakan surat berharga syariah sebagai underlying asset untuk akad jual-beli dengan janji untuk dibeli atau dijual kembali. Bertujuan mengendalikan likuiditas jangka pendek perbankan syariah. Beberapa instrumen operasi pasar terbuka berbasis syariah yang mulai aktif

digunakan Bank Markazi untuk transmisi kebijakan moneter Islamic di Indonesia (Sukmana, R. dan H. Yumanita. 2010: 98).

Fasilitas pembiayaan

Kondisi fasilitas pembiayaan dalam instrumen fasilitas pembiayaan (*financing facility*) dalam kebijakan moneter syariah Iran adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Mudharabah. Fasilitas pembiayaan kerja sama usaha antara Bank Markazi dan bank umum syariah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Bertujuan memberikan akses likuiditas jangka pendek bagi perbankan syariah.
- 2) Pembiayaan Al-Qardhul Hasan. Merupakan fasilitas pembiayaan talangan dalam bentuk pinjaman lunak (qard) tanpa bunga dari Bank Markazi ke bank syariah untuk mengatasi ketidakcukupan likuiditas jangka pendek.
- 3) Diskonto Sukuk Syariah. Bank Markazi memberikan fasilitas rediskonto atau mendiskontokan sukuk-sukuk atau surat berharga syariah yang dimiliki bank umum syariah untuk menyediakan tambahan likuiditas dengan basis aset jangka panjang.
- 4) Pembiayaan Bukan Tunai. Pemberian fasilitas transfer dana dan pembiayaan lain secara non tunai oleh Bank Markazi ke bank syariah dalam jangka waktu & jumlah tertentu berdasarkan prinsip jual beli aset.

Instrumen fasilitas pembiayaan syariah tersebut dirancang inovatif dan fleksibel oleh Bank Markazi guna mendukung likuiditas, solvabilitas, serta akselerasi intermediasi perbankan syariah di Iran. (Sukmana, R. dan H. Yumanita. 2010: 72).

Cadangan wajib minimum

Berikut adalah penjelasan mengenai instrumen cadangan wajib minimum (reserve requirement) dalam kebijakan moneter syariah di Iran:

- 1) Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah. Bank umum syariah diwajibkan Bank Markazi menyimpan sejumlah dana dalam bentuk giro wajib minimum di Bank Markazi. Besaran GWM syariah ditentukan berdasarkan jenis akad dan komposisi dana pihak ketiga bank syariah.
- 2) Sanksi GWM Syariah. Jika tidak memenuhi ketentuan GWM, bank syariah akan dikenai sanksi berupa "ganti rugi" sesuai prinsip ta'zir. Sanksi ini akan menambah beban operasional bank syariah yang bersangkutan.
- 3) Remunerasi GWM Syariah. GWM syariah mendapat imbalan bagi hasil dengan nisbah pemberian keuntungan yang disepakati antara bank umum syariah dengan Bank Markazi.
- 4) Penyesuaian GWM Syariah. Bank Markazi dapat menaikkan atau menurunkan besaran parameter GWM syariah guna mengendalikan likuiditas perbankan syariah sekaligus mendorong fungsi intermediasinya dalam perekonomian. Jadi instrumen GWM syariah merupakan bagian vital dari perangkat kebijakan moneter Bank Markazi dalam menjaga stabilitas sistem perbankan syariah di Iran.

Penentuan suku bunga acuan

Karena Iran menerapkan sistem perbankan dan keuangan syariah, maka tidak menggunakan penetapan suku bunga acuan konvensional dalam kebijakan moneternya.

Namun, Bank Markazi menetapkan tingkat imbal hasil acuan syariah yang berfungsi sebagai suku bunga acuan bagi operasi moneter dan perbankan syariah di Iran, meliputi:

- 1) Tingkat Imbal Hasil Acuan Bank Markazi (TIABM). TIABM ditetapkan setiap bulan oleh Komite Kebijakan Moneter Bank Markazi berdasarkan imbal hasil rata-rata instrumen keuangan syariah seperti bagi hasil, fee/ujrah, dan pendapatan sewa. TIABM dijadikan acuan penetapan tingkat keuntungan produk perbankan syariah seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan.
- 2) Tingkat Imbal Hasil Pasar Uang Antar Bank Syariah. Merupakan tingkat imbal hasil rata-rata atas transaksi pasar uang antar bank syariah dalam instrumen Mudarabah dan Wakalah. Tingkat imbal hasil ini juga menjadi acuan bagi bank syariah. Jadi, tingkat imbal hasil merupakan suku bunga acuan syariah yang berperan penting dalam transmisi kebijakan moneter dan operasi perbankan syariah di Iran.

Struktur sistem perbankan Pakistan

- 1). Masa Pra-Kemerdekaan (sebelum 1947). Pakistan menjadi bagian dari India yang dijajah Inggris. Rupee India diterbitkan dan dikelola oleh Reserve Bank of India (RBI).
- 2). Masa Awal Kemerdekaan (1947-1953). Pakistan merdeka pada 1947, tetapi mata uang Rupee Pakistan masih diterbitkan RBI India hingga 1948. Baru pada 1948, State Bank of Pakistan (SBP) resmi berdiri menjadi bank sentral Pakistan.
- 3). Masa Pembangunan Ekonomi (1954-1971). SBP mulai menerbitkan Rupee Pakistan sendiri. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan stabilisasi nilai tukar setelah Perang Indo-Pakistan 1965.
- 4). Masa Nasionalisasi Perbankan (1972-1977). Pemerintah Pakistan menasionalisasi semua bank asing dan swasta menjadi bank milik negara. SBP menjadi satu-satunya otoritas moneter.
- 5). Masa Liberalisasi dan Privatisasi (1978-hingga kini). Reformasi ekonomi Pakistan dimulai dengan deregulasi sistem moneter dan perbankan. Privatisasi bank terjadi pasca 1997. Bank syariah mulai berkembang pesat setelah 2002. Setelah kemerdekaan tahun 1947, Pakistan melanjutkan penggunaan mata uang Rupee Pakistan yang dikeluarkan oleh Reserve Bank of India. Pada 1948, State Bank of Pakistan (SBP) didirikan sebagai bank sentral dengan otoritas penuh mengelola kebijakan moneter & nilai tukar Rupee Pakistan. Pada 1950-an, sistem moneter Pakistan banyak dipengaruhi kebijakan India karena ketergantungan perdagangan dua negara. Lalu Pakistan beralih ke sistem devisa bebas. Pada 1970-80an, bank perserikatan daerah Pakistan ditransformasikan menjadi bank komersial modern. Regulasi bank juga diperkuat di bawah SBP. Setelah 2002, Pakistan gencar mengembangkan perbankan syariah dengan dukungan payung hukum dan infrastruktur khusus dari SBP sebagai bank sentral.

- 6.) Saat ini Pakistan terus berupaya memperluas layanan keuangan syariah dalam kerangka sistem moneter dan perbankan ganda bersama konvensional yang sudah mapan.

Bank Negara Pakistan

- 1). State Bank of Pakistan (SBP). Merupakan bank sentral Pakistan yang bertugas menjalankan kebijakan moneter, mengawasi perbankan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. SBP juga bertanggung jawab mengembangkan perbankan syariah di Pakistan.
- 2) Bank Komersial. Terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Beberapa bank konvensional juga memiliki cabang atau jendela syariah. Contoh bank komersial besar antara lain National Bank of Pakistan, Habib Bank, United Bank, MCB Bank, dll.
- 3) Lembaga Keuangan Mikro. Memberikan akses layanan keuangan dan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Contoh lembaga mikro di Pakistan seperti Khushhali Bank.
- 4) Lembaga Pembiayaan Non-Bank. Seperti perusahaan asuransi, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, koperasi simpan pinjam, dll. Banyak yang telah memberikan layanan keuangan syariah.

Fasilitas Kredit Bank Sentral

SBP memberikan fasilitas rediskonto & berbagai kredit bagi perbankan guna mendukung sektor pertanian, ekspor, UKM, pembiayaan perumahan, dan pembangunan infrastruktur. Itulah struktur sistem perbankan Pakistan yang terus berkembang dengan dukungan regulasi dan pengawasan dari bank sentralnya.

Bank-bank komersial

Berikut ini penjelasan mengenai struktur sistem bank-bank komersial di Pakistan:

- 1) Bank-bank Umum. Mencakup bank-bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank umum konvensional didominasi beberapa bank milik negara seperti National Bank Pakistan, Habib Bank, dan United Bank. Sedangkan bank syariah terbesar adalah Meezan Bank & Faysal Bank.
- 2) Bank Islamic Windows. Beberapa bank konvensional besar seperti MCB Bank, UBL Bank, Standard Chartered Pakistan, dll, memiliki jendela/unit layanan perbankan syariah di bawah satu entitas lisensi perbankan. Dikenal sebagai Islamic Banking Windows.
- 3) Bank Pembangunan. Bertujuan membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan di Pakistan. Yang terbesar adalah National Bank for Reconstruction and Development.
- 4) Bank Asing. Terdiri dari cabang bank asing yang beroperasi di Pakistan. Mayoritas berasal dari Inggris, Timur Tengah, Asia Selatan & Asia Tenggara. Contoh: Emirates NBD, Al Baraka Bank, ICICI Bank, Woori Bank, dll.

- 5) Bank Perkreditan Mikro. Memberikan pembiayaan dalam skala kecil ke sektor pertanian dan perdesaan, serta usaha mikro dan UKM di perkotaan. Ditujukan untuk inklusi keuangan (Ahmada, Z. dan A.S. Shaikh, 2017: 54).

Instrumen dan kebijakan moneter di Pakistan

Operasi pasar terbuka

Berikut ini adalah instrumen operasi pasar terbuka (open market operations) dalam kebijakan moneter Pakistan:

- 1) Repo dan Reverse Repo. State Bank of Pakistan (SBP) melakukan transaksi Repo dengan bank-bank untuk menyediakan atau menyerap likuiditas jangka pendek dalam sistem perbankan Pakistan. Repo dilakukan menggunakan surat berharga atau obligasi sebagai underlying asset.
- 2) Outright Sale/Purchase Securities. SBP menjual atau membeli surat berharga jangka pendek (T-bills) maupun jangka panjang (obligasi Pemerintah) secara langsung dari/ke pasar primer untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan likuiditas bank.
- 3) Islamic Refinance Facility. Fasilitas pembiayaan syariah berbasis Mudharabah antara SBP dengan bank-bank di Pakistan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bank syariah maupun bank konvensional yang memiliki Islamic banking windows.
- 4) Standing Ceiling Facility. Fasilitas overdraft bagi bank komersial Pakistan untuk meminjam dana dari SBP dengan tingkat bunga/fee tertentu, guna mencukupi kebutuhan likuiditas bank secara temporer. Itulah instrumen operasi pasar terbuka yang sering digunakan SBP dalam kebijakan moneter Pakistan.

Fasilitas pembiayaan

Berikut ini adalah instrumen fasilitas pembiayaan dalam kebijakan moneter Pakistan:

- 1). *Export Refinance Scheme*
Fasilitas pembiayaan ekspor yang diberikan State Bank of Pakistan (SBP) kepada bank-bank komersial untuk disalurkan kepada eksportir Pakistan. Bertujuan mendukung ekspor dan devisa negara.
- 2). *Long Term Financing Facility*
Pembiayaan infrastruktur dan sektor pengembangan prioritas seperti energi, transportasi, telekomunikasi, dll yang disalurkan bank komersial dengan sumber dana murah dari SBP.
- 3). *Refinance Facility for Modernization of SMEs*
Fasilitas kredit dengan bunga rendah ini menysasar sektor UKM di Pakistan untuk memodernisasi peralatan, teknologi, dan proses produksi melalui bank komersial.
- 4). *Islamic Refinance Facility*
Fasilitas pembiayaan syariah dari SBP ke bank-bank berdasarkan prinsip Mudharabah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan syariah maupun Islamic banking windows.
- 5). *Credit Guarantee Scheme for Small & Rural Enterprises*

Skema garansi kredit bagi bank yang menyalurkan pinjaman ke sektor usaha mikro, kecil & menengah di daerah rural Pakistan.

Giro wajib minimum

Berikut ini penjelasan mengenai instrumen giro wajib minimum (GWM) dalam kebijakan moneter Pakistan:

- 1). Cash Reserve Requirement (CRR). Merupakan GWM konvensional yang wajib ditempatkan bank umum ke dalam rekening cadangan di State Bank of Pakistan (SBP). CRR saat ini 5% dari total dana pihak ketiga bank.
- 2). Statutory Liquidity Requirement (SLR). SLR mewajibkan bank umum menginvestasikan sebagian dananya ke surat berharga pemerintah Pakistan. SLR saat ini 15% dari total dana pihak ketiga bank komersial.
- 3). Islamic Banking Cash Reserve Requirement. GWM khusus bank umum syariah sesuai standard Akad Wadiah yad Dhamanah dengan Agency Agreement antara bank syariah dan SBP. Besaran GWM syariah saat ini 4% dari dana pihak ketiga.
- 4). Liquid Asset Requirement (QLR). Buffer likuiditas minimum dalam bentuk surat berharga syariah yang wajib dipenuhi oleh Islamic banking windows dan bank syariah di Pakistan. Itulah perangkat instrumen GWM dan likuiditas minimum yang ditetapkan regulator dalam kerangka kebijakan moneter Pakistan (Sukmana, R. dan H. Yumanita., 2010: 42).

Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah

Berikut ini instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam kebijakan moneter Pakistan:

- 1). Islamic Refinance Facility
Fasilitas pembiayaan syariah dari State Bank of Pakistan (SBP) ke bank-bank komersial dengan skema Mudharabah atau Wakalah bil Ujrah. Bertujuan menyalurkan likuiditas murah jangka pendek ke sektor riil.
- 2). Shariah Compliant Lending Facility
Fasilitas pinjaman syariah bagi Islamic banking windows dan bank Islam untuk disalurkan ke sektor pertanian, energi terbarukan, UKM, dan konsumsi. Didasarkan pada akad Ijarah dan Diminishing Musharakah.
- 3). Islamic Long Term Financing Facility for Infrastructure Projects
Pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang dengan prinsip Ijarah atau Istisna' antara SBP, bank komersial, dan Baitul Mal. Menargetkan sektor energi, transportasi, telekomunikasi, dll.
- 4). Government of Pakistan Ijara Sukuk
Sukuk sovereign berbasis aset Ijarah yang diterbitkan Pemerintah Pakistan melalui SBP. Bertujuan membiayai proyek-proyek infrastruktur nasional dengan skema investasi syariah. Instrumen-instrumen tersebut bertujuan mendorong inklusi keuangan syariah dan pertumbuhan sektor riil Pakistan melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dia atas tentang Kebijakan Moneter di Negara Islam Iran dan Pakistan adalah sebagai berikut:

1. Baik Iran dan Pakistan merupakan negara dengan mayoritas populasi muslim yang menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam, termasuk kebijakan moneter berbasis syariah.
2. Meski memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, kedua negara sama-sama mengembangkan sistem perbankan dan instrumen moneter syariah pasca 1980-an dengan dukungan regulasi dan infrastruktur khusus.
3. Bank sentral Iran dan Pakistan telah mengimplementasikan beragam instrumen syariah untuk operasi moneter dan pengendalian moneter, seperti sertifikat Bank Indonesia, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan lain sebagainya.
4. Tantangan yang dihadapi kedua negara antara lain penetrasi perbankan syariah yang masih relatif kecil, kurangnya SDM keuangan syariah, dan terbatasnya instrumen keuangan syariah di pasar.
5. Ke depan, kerja sama bilateral dan multilateral bidang ekonomi dan keuangan syariah antara Iran dan Pakistan perlu diperkuat, termasuk pertukaran pengetahuan terkait pengembangan kebijakan moneter syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asturi. Wulan, (2013). Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 2 Edisi Juli 2013.
- Undang-Undang Bank Sentral Republik Islam Iran (1972), Mengatur tugas, tanggung jawab, dan struktur organisasi Bank Markazi sebagai bank sentral Iran.
- M. A. Choudhary et al. (2015). An estimation of the extent of Islamic banking in Iran. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Penelitian ini membahas perkembangan perbankan syariah di Iran pasca revolusi Islam.
- S. H. Mirshojaeian & H. S. K. Obidollah (2013). Theoretical and Practical Review of Iran's Central Banking System. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*.
- Artikel ini menganalisis secara komprehensif struktur, kewenangan, operasi dan kebijakan Bank Markazi. *Bank for International Settlements (2009). Issues in the Governance of Central Banks*.
- Publikasi BIS mengulas isu tata kelola bank sentral di berbagai negara termasuk Iran. *Bank Sentral Republik Islam Iran. Struktur Organisasi Bank Markazi*.
- Website resmi Bank Markazi yang menjelaskan gambaran umum tugas dan struktur organisasi bank sentral.
- Berikut ini beberapa referensi jurnal dan buku terkait pembahasan artikel "Kebijakan Moneter di Negara Islam Iran dan Pakistan":

- Sukmana, R. dan H. Yumanita. (2010). "Comparing The Implementation of Islamic Monetary Policy in Malaysia, Indonesia and Pakistan." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Pratama, Y.C. (2015). "Structural Model of Maqasid Sharia Index and Monetary Policy in Indonesia and Pakistan." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.
- Ahmada, Z. dan A.S. Shaikh. (2017). "Impact of Policy Rate on Bank Deposit and Lending Rates in Pakistan." *Journal of Finance & Banking Studies*.
- Widodo, H. (2012). "Comparative Study of Islamic Monetary Policy Implementation: Case of Iran and Pakistan." *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*.
- Hira, T.K. dan K.A. Zaidi. (2021). *Money and Banking Systems in Iran and Pakistan: Operations, Policies and Islamic Alternatives*. Springer Nature.
- Karshenas, M. dan P. Mavrotas. (eds) (2006). *Economic Liberalisation and Privatisation in Iran: The International Dimension*. SOAS/University of London.
- Sukirno. Sadono, (2015) *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.